

FAKTOR KEPEMILIKAN LAHAN DALAM STATUS SOSIAL EKONOMI BURUH TANI (STUDI KASUS DI DESA BULUREJO, KECAMATAN PURWOHARJO, BANYUWANGI)

Eva Sandari Dyah Sulistyawati¹, Pambudi Handoyo², Arief Sudrajat³

^{1,2,3}Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya
Email: eva.23390@mhs.unesa.ac.id^{1*}, pambudihandoyo@unesa.ac.id²,
ariefsudrajat@unesa.ac.id³

*Korespondensi: eva.23390@mhs.unesa.ac.id

(Submission 04-06-2025, Revisions 26-06-2025, Accepted 29-06-2025)

Abstract

This study examines the factor of agricultural land ownership in determining the socioeconomic status of farm laborers in Bulurejo Village, Purwoharjo District, Banyuwangi. Using Max Weber's social stratification theory, this research explores how disparities in land ownership affect the economic and social aspects of the community. The study employs a qualitative approach, with data collected through in-depth interviews, participatory observation, and document analysis. The findings reveal that landless farm laborers face economic instability and limited access to education and healthcare services, while landowners enjoy stable incomes and better social opportunities. This study highlights persistent inequalities stemming from land ownership and recommends the need for policies to reduce disparities through fair land management and inclusive social policies.

Keywords: *land ownership; socioeconomic inequality; farm laborers; social stratification; rural development.*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji faktor kepemilikan lahan pertanian dalam menentukan status sosial ekonomi buruh tani di Desa Bulurejo, Kecamatan Purwoharjo, Banyuwangi. Dengan menggunakan teori stratifikasi sosial Max Weber, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana ketimpangan kepemilikan lahan memengaruhi aspek ekonomi dan sosial masyarakat. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Hasil temuan menunjukkan bahwa buruh tani tanpa lahan menghadapi ketidakstabilan ekonomi serta akses terbatas terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Sementara pemilik lahan menikmati pendapatan yang stabil dan peluang sosial yang lebih baik. Penelitian ini menyoroti ketimpangan yang terus berlanjut akibat kepemilikan lahan dan memberikan rekomendasi perlunya kebijakan untuk mengurangi kesenjangan melalui pengelolaan lahan yang adil dan kebijakan sosial yang inklusif.

Kata Kunci: kepemilikan lahan; ketimpangan sosial ekonomi; buruh tani; stratifikasi sosial; pembangunan pedesaan.

PENDAHULUAN

Ketimpangan sosial dan ekonomi di masyarakat pedesaan telah lama menjadi perhatian dalam kajian sosiologi dan ekonomi. Terutama terkait dengan faktor-faktor yang menjadi penyebab ketimpangan, selalu menjadi perhatian para peneliti karena berkaitan dengan kehidupan seseorang dalam lingkungan sosialnya. Salah satu faktor penyebab ketimpangan adalah kepemilikan lahan. Faktor ini memiliki pengaruh signifikan terhadap status sosial ekonomi individu di pedesaan. Sebab, lahan bukan hanya bisa dinilai aset ekonomi, tetapi lebih dari itu, lahan juga merupakan simbol kekuasaan dan status dalam struktur sosial masyarakat desa. Dalam banyak kasus, kepemilikan lahan menentukan akses seseorang terhadap sumber daya, pengakuan sosial, dan bahkan pengaruh dalam

pengambilan keputusan kolektif.

Desa Bulurejo, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur merupakan desa agraris yang memiliki wilayah seluas 12,02 km² dan jumlah penduduk sebanyak 9.148 jiwa (4.548 laki-laki dan 4.600 perempuan), dengan kepadatan 761 jiwa/km². Di desa tersebut, mata pencaharian utama ada di sektor pertanian. Berdasarkan data BPS (2024), sekitar 60% rumah tangga tergolong buruh tani tanpa lahan, dan hanya 18% merupakan petani pemilik lahan. Selebihnya, bekerja di sektor informal seperti produksi batako dan perdagangan kecil. Desa ini termasuk kategori “Desa Berkembang” menurut Permendesa No. 2 Tahun 2016. Sarana pendidikan dan kesehatan terbatas, dan sebagian besar buruh tani tidak memiliki jaminan kesehatan aktif (JKN). Data pemerintah desa mencatat adanya empat unit IKM yang menyerap sembilan tenaga kerja. Ini menunjukkan bahwa alternatif ekonomi yang ada di desa tersebut masih sangat terbatas.

Perbedaan jumlah petani pemilik lahan dan buruh tani tanpa lahan di Desa Bulurejo, Kecamatan Purwoharjo, Banyuwangi cenderung menciptakan ketimpangan sosial dimana buruh tani yang tidak memiliki lahan berada pada posisi sosial dan ekonomi yang lebih rendah. Ketimpangan ini membuat buruh tani harus menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan dasar serta keterbatasan dalam mobilitas sosial. Situasi ini mencerminkan pola ketimpangan struktural yang berdampak pada ekonomi individu sekaligus struktur sosial komunitas pedesaan secara menyeluruh.

Dalam sosiologi, persoalan ketimpangan sosial ekonomi menjadi kajian penting karena ketimpangan tidak hanya berkaitan dengan persoalan distribusi kekayaan, tetapi juga sebagai persoalan relasi sosial dan kekuasaan. Sosiologi tidak hanya memandang struktur ekonomi, tetapi juga bagaimana akses terhadap status sosial dan kekuasaan memengaruhi posisi individu dalam masyarakat. Dalam kerangka ini, Max Weber merumuskan adanya tiga dimensi dalam struktur sosial masyarakat, yaitu: dimensi kelas ekonomi yang berkaitan dengan akses terhadap sumber daya, status sosial yang berkaitan dengan pengakuan sosial, dan kekuasaan politik yang berkaitan dengan kemampuan memengaruhi keputusan. Pembagian struktur sosial ini juga dikenal sebagai teori stratifikasi sosial (Maunah, 2015).

Di dalam masyarakat agraris seperti Desa Bulurejo, pemilik lahan cenderung mendominasi ketiga dimensi ini, sementara buruh tani mengalami subordinasi tidak hanya secara ekonomi, tetapi juga secara simbolik dan politis. Melalui penerapan teori Weber, penelitian ini berusaha menjelaskan relasi kuasa dan hierarki sosial dalam komunitas lokal secara multidimensional. Dengan fokus kajian pada relasi antara buruh tani dan pemilik lahan, penelitian ini menyoroti bagaimana ketimpangan terjadi dan direproduksi melalui mekanisme sosial sehari-hari.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kepemilikan lahan. Penelitian yang dilakukan Wanimbo (2019), misalnya, menegaskan pentingnya kepemilikan lahan dalam menentukan status sosial ekonomi petani. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kondisi sosial ekonomi petani dipengaruhi oleh pendidikan rendah, sikap mental tradisional, serta keterbatasan akses terhadap teknologi dan pasar. Sementara penelitian Mernawati et al., (2023) menemukan bahwa petani pemilik lahan memperoleh pendapatan lebih tinggi dibandingkan penyewa. Penelitian yang dilakukan Angkoso et al., (2020) menyoroti fragmentasi lahan sebagai penyebab ketimpangan di kalangan petani gurem. Ketiadaan lahan tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi tetapi juga memengaruhi martabat sosial individu dalam komunitas pedesaan (Sihaloho et al., 2016).

Penelitian yang dilakukan penulis di Desa Bulurejo, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, secara spesifik menyoroti posisi sosial-ekonomi buruh tani tanpa lahan dalam kerangka sosiologis. Desa Bulurejo dipilih sebagai lokasi penelitian karena mencerminkan realitas desa agraris dengan struktur sosial yang timpang dan ketergantungan tinggi pada lahan pertanian. Kesenjangan antara buruh tani dan pemilik lahan tampak dalam akses terhadap sumber daya sosial dan partisipasi dalam program bantuan desa. Selain itu, desa ini belum banyak dikaji dalam kajian sosiologi agraria, terutama dari perspektif mikro.

Penelitian ini dilakukan untuk menyelami secara lebih dalam bagaimana kepemilikan lahan memengaruhi struktur sosial dan status buruh tani di tingkat lokal dengan menggunakan pendekatan mikro sosiologi, yakni pendekatan yang menekankan pada pengalaman subjektif, tindakan sosial, dan makna yang dibentuk oleh individu dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, buruh tani tidak dilihat hanya sebagai angka statistik, tetapi sebagai aktor sosial yang aktif menyusun strategi bertahan hidup, menjalin jaringan sosial, serta menegosiasikan peran dan posisi mereka dalam struktur sosial

desa. Pendekatan ini memberikan ruang untuk melihat dinamika lokal secara mendalam, terutama bagaimana ketimpangan dipahami, dialami, dan dilawan oleh mereka yang berada di posisi subordinat.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran kepemilikan lahan dalam menentukan status sosial ekonomi buruh tani di Desa Bulurejo. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pengaruh ketimpangan kepemilikan lahan terhadap kehidupan sosial dan ekonomi buruh tani; mengeksplorasi mekanisme adaptasi yang digunakan oleh buruh tani dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi akibat tidak memiliki lahan, dan memberikan rekomendasi kebijakan untuk mendorong akses yang lebih adil terhadap sumber daya ekonomi dan sosial bagi buruh tani.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap literatur tentang stratifikasi sosial di pedesaan, sekaligus memberikan wawasan praktis untuk pengambilan kebijakan yang lebih inklusif dalam mendukung kesejahteraan buruh tani. Penelitian ini juga berkontribusi dalam memperluas pemahaman tentang dinamika sosial dan ekonomi di pedesaan, dengan menyoroti peran struktur sosial dan akses terhadap sumber daya dalam menentukan peluang mobilitas sosial.

Melalui analisis empiris dan teoritis, penelitian ini menawarkan perspektif baru tentang pentingnya pengelolaan lahan yang adil dan inklusif sebagai upaya untuk mengurangi ketimpangan sosial di pedesaan. Penelitian ini juga mempertegas perlunya pendekatan yang lebih holistik dalam memahami hubungan antara struktur ekonomi, akses terhadap sumber daya, dan dinamika sosial di komunitas pedesaan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam bagaimana kepemilikan lahan memengaruhi status sosial ekonomi buruh tani dan petani pemilik lahan di Desa Bulurejo, Kecamatan Purwoharjo, Banyuwangi. Pendekatan kualitatif dipilih karena sifatnya yang mampu menggali makna dari pengalaman hidup, pandangan, serta strategi adaptasi individu dalam konteks sosial mereka (Helaluddin, 2019). Dengan pendekatan ini, penelitian ini dapat menangkap dinamika sosial-ekonomi yang kompleks dan memberikan gambaran yang lebih holistik tentang pengaruh kepemilikan lahan terhadap posisi sosial dan ekonomi para pelaku utama di desa.

Selain itu, pendekatan ini relevan karena memungkinkan analisis yang lebih kontekstual, terutama dalam memahami bagaimana faktor-faktor lokal seperti struktur sosial, budaya, dan kebijakan desa turut memengaruhi relasi antara buruh tani dan petani pemilik lahan. Kerangka teori yang digunakan adalah teori stratifikasi sosial dari Max Weber, yang menyoroti hubungan antara kepemilikan ekonomi (termasuk aset seperti lahan), status sosial, dan peluang ekonomi dalam masyarakat (Maunah, 2015). Dengan pendekatan ini, pengalaman, pandangan, dan strategi adaptasi individu dalam konteks sosial mereka dapat digali (Yusrida & Ritonga, 2024).

Penelitian dilakukan pada bulan September 2024 di Desa Bulurejo, Kecamatan Purwoharjo, Banyuwangi, Jawa Timur, yang merupakan daerah dengan karakteristik pedesaan yang didominasi oleh aktivitas pertanian. Desa tersebut dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki karakteristik agraria yang khas dan relevan secara teoritis maupun empiris. Informan dalam penelitian ini terdiri dari sembilan orang yang dipilih melalui teknik *purposive sampling*, yaitu tiga orang buruh tani, dua orang petani pemilik lahan, dua perangkat desa, dan dua warga desa sekitar, dengan usia sekitar 35 – 60 tahun.

Pemilihan informan dilakukan berdasarkan kriteria berikut:

1. Buruh tani yang tidak memiliki lahan sendiri.
2. Petani pemilik lahan dengan luas lahan lebih dari satu hektar.
3. Perangkat desa yang memiliki pengetahuan mengenai kebijakan lokal terkait kepemilikan lahan.
4. Warga desa sekitar yang memiliki pandangan mengenai hubungan sosial antara buruh tani dan petani pemilik lahan.

Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan untuk menghasilkan temuan yang valid dan relevan. Tahap pertama adalah persiapan, yang dimulai dengan survei lokasi untuk memahami karakteristik wilayah dan kondisi sosial ekonomi masyarakat di Desa Bulurejo. Survei ini memberikan gambaran awal yang menjadi dasar untuk merancang langkah penelitian selanjutnya. Pada tahap ini, juga disusun panduan wawancara mendalam berdasarkan teori stratifikasi

sosial Weber, yang dirancang untuk menggali hubungan antara kepemilikan lahan dan status sosial ekonomi.

Tahap selanjutnya adalah pengumpulan data, yang dilakukan melalui berbagai metode. Wawancara mendalam dilakukan secara tatap muka dengan informan yang dipilih, seperti buruh tani, petani pemilik lahan, dan perangkat desa. Wawancara ini bertujuan untuk memahami pengalaman, pandangan, serta strategi adaptasi yang dilakukan oleh para informan dalam menghadapi tantangan sosial dan ekonomi yang terkait dengan kepemilikan lahan. Selain itu, observasi partisipatif dilakukan dengan melibatkan peneliti dalam aktivitas sehari-hari masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengamati interaksi sosial, pola kerja, dan dinamika hubungan antara buruh tani, petani pemilik lahan, perangkat desa, serta warga sekitar secara langsung.

Data sekunder juga dikumpulkan melalui dokumentasi, seperti dokumen resmi pemerintah Desa Bulurejo (data IKM dan pengajuan JKN Desa Bulurejo tahun 2020-2024), data BPS Kecamatan Purwoharjo Banyuwangi 2024, catatan lapangan, dan foto-foto kegiatan yang relevan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema utama yang muncul dari wawancara dan observasi. Analisis ini dilakukan secara mendalam untuk memahami bagaimana kepemilikan lahan memengaruhi status sosial ekonomi masyarakat. Validasi data dilakukan melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memastikan konsistensi informasi dan keakuratan temuan.

Hasil analisis tersebut kemudian disusun dalam laporan penelitian. Laporan ini memuat temuan utama yang diperoleh, interpretasi berdasarkan teori Weber, serta rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan buruh tani dan petani pemilik lahan. Dengan demikian, laporan ini tidak hanya memberikan pemahaman teoretis, tetapi juga memberikan kontribusi praktis dalam merumuskan kebijakan yang relevan.

Dalam proses pengumpulan dan analisis data, wawancara mendalam dilakukan dengan menggunakan panduan semi-terstruktur untuk memungkinkan eksplorasi isu-isu yang relevan secara fleksibel. Seluruh wawancara direkam dengan izin informan, kemudian ditranskripsi secara verbatim untuk mempermudah analisis. Observasi partisipatif juga dilakukan dengan mencatat pola interaksi sosial, dinamika kerja, dan hubungan antara kelompok sosial di Desa Bulurejo. Data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi kemudian dianalisis melalui beberapa tahapan, yaitu pengkodean, pengembangan tema, dan interpretasi. Tahap pengkodean bertujuan untuk mengelompokkan data ke dalam kategori tertentu. Setelah itu, tema utama dikembangkan, seperti pengaruh kepemilikan lahan terhadap status sosial ekonomi. Akhirnya, temuan ini diinterpretasikan dalam kerangka teori Weber untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini berfokus pada ketimpangan sosial ekonomi antara buruh tani yang tidak memiliki lahan dan petani pemilik lahan di Desa Bulurejo. Berdasarkan wawancara mendalam dan observasi partisipatif, ditemukan bahwa ketimpangan sosial ini tercermin dalam beberapa aspek kehidupan, seperti pendapatan, akses pendidikan, akses kesehatan, dan peluang ekonomi. Data yang dikumpulkan telah diolah dan disajikan dalam tabel berikut untuk memudahkan pemahaman perbedaan antara kedua kelompok sosial ini.

Tabel 1. Perbandingan Aspek Sosial-Ekonomi antara Buruh Tani dan Petani Pemilik Lahan

Aspek	Buruh Tani tanpa Lahan	Petani Pemilik Lahan
Persentase dari KK	±60%	±18%
Pendapatan	Tidak stabil (±Rp.600.000-1.000.000/bulan)	Stabil (±Rp.1.500.000-3.000.000/bulan, bahkan lebih)
Tingkat Pendidikan	SD – SMP (SMA jarang)	Rata-rata SMA – Perguruan Tinggi
Jaminan Kesehatan (JKN)	Beberapa belum memiliki	Banyak yang mampu mengakses
Peran Sosial di Desa	Minim dilibatkan	Aktif di kelompok tani & musyawarah desa
Peluang Ekonomi	Terbatas	Lebih Luas

Sumber: Diolah oleh peneliti (2024)

Tabel 1 memperlihatkan bahwa dalam aspek sosial-ekonomi, terjadi ketimpangan yang mencolok antara buruh tani dan petani pemilik lahan. Hal itu terlihat dalam hal pendapatan, akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta peluang ekonomi. Buruh tani sering kali bergantung pada pekerjaan musiman dengan pendapatan yang tidak menentu, sementara petani pemilik lahan menikmati stabilitas ekonomi berkat kepemilikan lahan yang memberi mereka akses lebih besar terhadap peluang ekonomi dan sumber daya sosial.

Akses pendidikan dan kesehatan juga menjadi faktor penting dalam ketimpangan sosial ini. Sebagian besar buruh tani di Desa Bulurejo memiliki akses terbatas ke pendidikan dan layanan kesehatan, yang berkontribusi pada kesulitan mereka untuk meningkatkan status sosial-ekonomi. Sebaliknya, petani pemilik lahan memiliki kesempatan lebih baik dalam hal pendidikan untuk anak-anak mereka dan juga lebih mudah mengakses fasilitas kesehatan, yang memberikan mereka keuntungan sosial jangka panjang.

Berdasarkan data BPS Kecamatan Purwoharjo (2024), diketahui bahwa Desa Bulurejo dihuni oleh 9.148 jiwa, dengan mayoritas penduduk bekerja sebagai buruh tani. Tercatat sekitar 60% rumah tangga merupakan buruh tani tanpa lahan, sedangkan hanya 18% yang tercatat sebagai petani pemilik lahan. Data ini mencerminkan adanya ketimpangan terutama dalam akses jaminan kesehatan. Selain itu, berdasarkan data pengajuan JKN tahun 2020–2024, diketahui bahwa sebagian besar buruh tani tidak memiliki status peserta aktif, yang menunjukkan rendahnya jangkauan program kesehatan nasional di kalangan kelompok rentan.

Di sisi lain, sektor informal seperti Industri Kecil Menengah (IKM) produksi batako memang ada, namun hanya menyerap sebagian tenaga kerja tetap menunjukkan terbatasnya diversifikasi ekonomi lokal. Hal ini memperjelas bahwa buruh tani menghadapi hambatan struktural tidak hanya dalam akses terhadap lahan, tetapi juga dalam memperoleh jaminan sosial dan ekonomi lainnya. Oleh karena itu, keberpihakan kebijakan publik dan distribusi program negara perlu ditinjau kembali agar benar-benar menjangkau kelompok paling rentan di pedesaan.

• Teori Stratifikasi Sosial Max Weber

Max Weber dalam teori stratifikasi sosialnya mengemukakan bahwa status sosial seseorang sangat dipengaruhi oleh tiga dimensi utama: kekayaan (ekonomi), kekuasaan (politik), dan prestise (sosial). Salah satu faktor kunci yang membedakan status sosial dalam masyarakat, menurut Weber, adalah kepemilikan ekonomi, termasuk kepemilikan atas aset-aset produktif seperti lahan (Siska Wahyuni Fitri et al., 2023).

Dalam konteks Desa Bulurejo, penelitian ini mengonfirmasi bahwa petani pemilik lahan menikmati keuntungan sosial dan ekonomi yang signifikan berkat kepemilikan lahan mereka. Kepemilikan lahan memungkinkan petani ini untuk memperoleh pendapatan yang stabil dari hasil

pertanian, yang selanjutnya memberikan mereka peluang untuk berinvestasi dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Kepemilikan lahan bagi petani bukan hanya berarti akses terhadap sumber daya ekonomi yang menguntungkan, tetapi juga membuka akses kepada berbagai kesempatan sosial yang lebih baik.

Dengan pendapatan yang lebih stabil, petani pemilik lahan dapat menyekolahkan anak-anak mereka hingga tingkat yang lebih tinggi dan memiliki jaminan akses terhadap layanan kesehatan yang lebih baik. Hal ini memberikan mereka keuntungan dalam mempertahankan status sosial yang lebih tinggi dalam masyarakat desa, yang seringkali diwariskan secara turun-temurun kepada anak-anak mereka. Dengan demikian, status sosial petani pemilik lahan lebih mudah dipertahankan dan bahkan dapat berkembang melalui akses yang lebih besar terhadap sumber daya dan peluang dalam masyarakat (Hekmatyar & Nugroho, 2018).

Weber menyatakan bahwa individu yang memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya ekonomi memiliki lebih banyak kesempatan untuk meraih kedudukan sosial yang lebih tinggi dan memperoleh pengaruh yang lebih besar dalam masyarakat (Susilawati, 2019). Hal ini terlihat di Desa Bulurejo, di mana petani pemilik lahan menikmati posisi sosial yang lebih tinggi dibandingkan dengan buruh tani yang tidak memiliki lahan. Dalam masyarakat tradisional pedesaan seperti ini, status sosial sangat terkait dengan kepemilikan lahan, karena lahan merupakan sumber daya utama yang menentukan kekayaan dan kestabilan ekonomi. Petani yang memiliki lahan dapat memanfaatkannya untuk menghasilkan pendapatan yang lebih terjamin, serta memperoleh peluang untuk memperbaiki kualitas hidup mereka dan meningkatkan posisi sosial mereka dalam komunitas.

Sebaliknya, buruh tani yang tidak memiliki lahan berada dalam posisi yang sangat berbeda. Mereka terjebak dalam ketidakpastian ekonomi, di mana pendapatan mereka sering kali tidak stabil, tergantung pada musim panen dan pekerjaan musiman yang tersedia. Tanpa akses terhadap lahan, buruh tani hanya dapat mengandalkan pekerjaan yang tidak menjanjikan kestabilan finansial. Mereka tidak memiliki modal untuk berinvestasi dalam pendidikan anak-anak mereka atau untuk mengakses layanan kesehatan yang lebih baik. Ketergantungan mereka pada pekerjaan yang tidak tetap ini membuat mereka lebih rentan terhadap perubahan ekonomi dan mengurangi mobilitas sosial mereka. Buruh tani yang tidak memiliki lahan cenderung terjebak dalam siklus kemiskinan yang diwariskan dari generasi ke generasi, dengan peluang yang sangat terbatas untuk memperbaiki status sosial-ekonomi mereka.

Weber juga mengemukakan bahwa dalam stratifikasi sosial, posisi sosial tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh prestise sosial yang dimiliki individu dalam masyarakat (Syah, 2015). Petani pemilik lahan sering kali memiliki prestise sosial yang lebih tinggi karena mereka dianggap sebagai pemilik sumber daya yang penting dalam masyarakat pedesaan. Mereka menjadi tokoh yang dihormati dan memiliki pengaruh lebih besar dalam pengambilan keputusan di tingkat desa. Sementara itu, buruh tani, meskipun bekerja keras dan berkontribusi pada ekonomi desa, sering kali tidak dihargai setara dengan petani pemilik lahan, karena mereka tidak memiliki sumber daya yang sama dan memiliki status sosial yang lebih rendah.

Keterbatasan akses terhadap sumber daya yang dimiliki buruh tani ini juga terkait dengan konsep "keberuntungan" dalam teori Weber. Dalam konteks Desa Bulurejo, buruh tani tidak hanya menghadapi ketidakpastian ekonomi, tetapi juga ketidakpastian dalam hal mobilitas sosial mereka. Tanpa kepemilikan lahan, mereka tidak memiliki sumber daya yang memungkinkan untuk meningkatkan status sosial mereka. Hal ini menggarisbawahi pentingnya akses terhadap sumber daya ekonomi sebagai penentu utama stratifikasi sosial dalam masyarakat, sesuai dengan pemikiran Weber yang menekankan bahwa individu yang memiliki sumber daya ekonomi lebih besar memiliki peluang yang lebih baik untuk meningkatkan status sosial mereka.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa teori stratifikasi sosial Max Weber dapat diterapkan secara efektif untuk memahami ketimpangan sosial yang ada di Desa Bulurejo, di mana kepemilikan lahan menjadi faktor kunci dalam menentukan posisi sosial-ekonomi individu. Petani pemilik lahan memiliki akses yang lebih besar terhadap peluang ekonomi dan sosial, yang memungkinkan mereka untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan status sosial mereka. Sementara itu, buruh tani yang tidak memiliki lahan berada pada posisi yang lebih rendah dalam stratifikasi sosial, dengan akses yang terbatas terhadap sumber daya dan peluang untuk memperbaiki kondisi sosial-ekonomi mereka. Oleh karena itu, kebijakan yang dapat mengatasi ketimpangan ini,

seperti redistribusi lahan atau pemberdayaan ekonomi bagi buruh tani, sangat penting untuk menciptakan keseimbangan sosial-ekonomi yang lebih baik dalam masyarakat pedesaan.

- **Ketimpangan Sosial Berdasarkan Struktur Ekonomi Lokal**

Ketimpangan sosial antara buruh tani dan petani pemilik lahan di Desa Bulurejo dapat dianalisis melalui lensa struktur ekonomi lokal yang mendasari pola distribusi kekayaan dan sumber daya dalam masyarakat. Desa Bulurejo, sebagai daerah yang mayoritas penduduknya bekerja di sektor pertanian, menunjukkan adanya hubungan langsung antara kepemilikan lahan dengan kesejahteraan ekonomi individu. Dalam struktur ekonomi desa yang berbasis pertanian, kepemilikan lahan menjadi salah satu penentu utama dalam mengakses berbagai peluang ekonomi (Nurul Huda, 2022).

Buruh tani di Desa Bulurejo sering kali terjebak dalam ketergantungan pada pekerjaan musiman, yang tidak dapat menjamin kestabilan ekonomi jangka panjang. Pendapatan yang mereka peroleh bersifat tidak menentu, sangat bergantung pada musim panen dan ketersediaan pekerjaan dari petani pemilik lahan. Ketika musim pertanian buruk atau jumlah pekerjaan yang tersedia terbatas, buruh tani akan mengalami kesulitan keuangan yang besar. Keterbatasan ini membuat mereka sulit untuk mengembangkan usaha atau memperbaiki kualitas hidup mereka, karena mereka tidak memiliki modal yang cukup untuk berinvestasi dalam pendidikan, kesehatan, atau sektor lain yang dapat meningkatkan status sosial-ekonomi mereka.

Di sisi lain, petani pemilik lahan memiliki posisi yang lebih menguntungkan dalam struktur ekonomi desa. Kepemilikan lahan memberikan mereka kontrol atas sumber daya penting yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Dengan kepemilikan ini, mereka tidak hanya dapat bertahan dari ketidakpastian ekonomi, tetapi juga memiliki potensi untuk mengembangkan usaha pertanian atau bahkan bisnis lainnya, yang memungkinkan mereka meningkatkan kualitas hidup. Petani pemilik lahan memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber daya seperti modal, teknologi pertanian, dan informasi pasar, yang memberikan mereka keuntungan kompetitif dalam menghasilkan keuntungan lebih besar dari usaha mereka. Selain itu, kepemilikan lahan sering kali juga diiringi dengan status sosial yang lebih tinggi di mata komunitas, yang membuka lebih banyak peluang untuk memperluas jaringan sosial dan mendapatkan pengaruh dalam pengambilan keputusan lokal.

Meskipun ada berbagai inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sosial, seperti program pelatihan keterampilan dan bantuan ekonomi, ketimpangan ini tetap sulit diatasi secara signifikan. Program-program tersebut mungkin dapat memberikan bantuan jangka pendek atau pelatihan keterampilan bagi buruh tani, tetapi mereka tidak secara langsung mengatasi masalah mendasar, yaitu ketergantungan buruh tani pada pekerjaan musiman yang tidak stabil dan kurangnya akses terhadap sumber daya produktif seperti lahan. Selain itu, beberapa petani pemilik lahan juga memanfaatkan program bantuan tersebut untuk memperluas usaha mereka, sementara buruh tani sering kali terhambat oleh keterbatasan modal dan akses untuk memanfaatkan peluang yang ada.

Ketimpangan yang terjadi tidak hanya terjadi dalam aspek ekonomi, tetapi juga dalam kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan politik. Petani pemilik lahan sering kali memiliki suara yang lebih besar dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan desa dan pengelolaan sumber daya alam. Mereka memiliki pengaruh dalam menentukan kebijakan terkait dengan pertanian, yang lebih banyak menguntungkan mereka. Sementara itu, buruh tani yang tidak memiliki akses langsung ke sumber daya dan kekuasaan, sering kali terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Ini memperburuk ketimpangan yang ada, karena keputusan-keputusan yang diambil lebih cenderung menguntungkan pihak yang sudah lebih berkuasa dan kaya, yaitu petani pemilik lahan.

Dalam konteks ini, teori struktur ekonomi lokal yang dikemukakan oleh beberapa ahli ekonomi sosial dan pembangunan sosial dapat digunakan untuk lebih memahami ketimpangan sosial yang terjadi. Menurut teori ini, struktur ekonomi lokal menentukan siapa yang memiliki akses terhadap sumber daya utama, siapa yang mendapatkan keuntungan dari perkembangan ekonomi, dan siapa yang terpinggirkan. Di Desa Bulurejo, struktur ekonomi yang berbasis pertanian dengan kepemilikan lahan sebagai faktor utama keberhasilan ekonomi telah menciptakan ketimpangan sosial yang signifikan antara buruh tani dan petani pemilik lahan. Meskipun ada beberapa upaya untuk mengurangi ketimpangan tersebut, seperti penyediaan pelatihan keterampilan dan bantuan pemerintah, faktor kepemilikan lahan tetap menjadi determinan utama dalam menciptakan ketimpangan yang jelas dalam kehidupan sosial dan ekonomi di desa ini.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada usaha-usaha untuk mengurangi ketimpangan sosial melalui intervensi pemerintah, kepemilikan lahan tetap menjadi faktor dominan yang memengaruhi status sosial dan ekonomi di Desa Bulurejo. Petani pemilik lahan memiliki posisi yang lebih kuat dalam struktur ekonomi desa dan lebih mampu mengakses peluang yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Sebaliknya, buruh tani yang tidak memiliki lahan terjebak dalam ketidakpastian ekonomi, dengan akses yang terbatas terhadap peluang untuk meningkatkan kondisi sosial-ekonomi mereka. Oleh karena itu, kebijakan yang dapat mengatasi ketimpangan sosial, perlu dipertimbangkan untuk menciptakan keseimbangan sosial-ekonomi yang lebih adil di masyarakat pedesaan.

- **Keterbatasan Akses terhadap Sumber Daya: Pendidikan dan Kesehatan**

Ketimpangan sosial yang terjadi antara buruh tani dan petani pemilik lahan di Desa Bulurejo tidak hanya terlihat dalam aspek ekonomi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh keterbatasan akses terhadap dua sumber daya utama, yaitu pendidikan dan layanan kesehatan. Akses yang terbatas terhadap kedua hal ini memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas hidup buruh tani, memperburuk kesenjangan sosial dan menghambat upaya mereka untuk meningkatkan status sosial-ekonomi.

Pendidikan merupakan faktor penting dalam meningkatkan status sosial dan ekonomi seseorang, karena memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memasuki pasar kerja yang lebih baik (Juariyah, 2012). Data yang dihimpun di Desa Bulurejo menunjukkan masih adanya anak buruh tani yang terpaksa berhenti sekolah lebih awal karena keterbatasan biaya dan fasilitas pendidikan yang tidak memadai. Mereka lebih memilih untuk bekerja membantu orang tua mereka, terutama pada musim panen, demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Hal ini membuat mereka kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan yang dapat memberikan mereka peluang untuk memperoleh pekerjaan dengan gaji yang lebih tinggi di masa depan. Sebaliknya, anak-anak petani pemilik lahan memiliki akses yang lebih baik untuk melanjutkan pendidikan, karena keluarga mereka mampu membiayai sekolah dan menyediakan waktu bagi anak-anak mereka untuk belajar tanpa terganggu kewajiban bekerja.

Merujuk pada data yang dihimpun Iqbal Ramadan et al., (2024), diketahui bahwa dari total 2.595 keluarga yang ada di Desa Bulurejo, sebanyak 400 keluarga ($\pm 15,4\%$) dikategorikan sebagai keluarga pra-sejahtera. Sebagian besar dari mereka merupakan keluarga buruh tani tanpa lahan, yang berhadapan langsung dengan tantangan struktural berupa keterbatasan pendidikan dan pendapatan rendah. Keterbatasan akses terhadap pendidikan ini mengarah pada terjadinya siklus kemiskinan yang sulit diputuskan. Anak-anak buruh tani yang tidak dapat melanjutkan pendidikan akan masuk ke dunia kerja dengan keterampilan yang terbatas, sehingga mereka terjebak dalam pekerjaan informal berupah rendah. Tanpa intervensi struktural, kemungkinan besar mereka akan mengalami nasib yang sama dengan orangtuanya, yakni menggantungkan hidup pada pekerjaan musiman yang tidak memberi jaminan pendapatan tetap.

Selain pendidikan, akses terhadap layanan kesehatan juga menjadi tantangan besar bagi buruh tani. Di Desa Bulurejo, masih banyak buruh tani yang tidak memiliki jaminan kesehatan atau kesulitan membayar biaya pengobatan ketika sakit. Mereka sering kali mengandalkan pengobatan tradisional atau menunda pengobatan, yang dapat memperparah kondisi kesehatan mereka. Berdasarkan data pengajuan JKN tahun 2020–2024, mayoritas buruh tani tidak terdaftar sebagai peserta aktif Jaminan Kesehatan Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa selain faktor ekonomi, akses terhadap hak-hak dasar pun tidak merata. Sebaliknya, petani pemilik lahan memiliki akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan, baik melalui skema JKN maupun kemampuan membayar layanan kesehatan secara mandiri. Kondisi ini memungkinkan mereka untuk menjaga kesehatan secara lebih optimal, yang turut menunjang produktivitas dan keberlanjutan usaha pertanian mereka.

Kondisi ini diperburuk oleh pelaksanaan program bantuan pemerintah yang belum sepenuhnya merata. Meskipun program pemberdayaan melalui Dana Desa telah dilaksanakan secara massif, data dari Iqbal Ramadan et al., (2024) menunjukkan bahwa alokasi dana pemberdayaan masyarakat hanya sekitar Rp244.495.000 atau 27,4% dari total Dana Desa sebesar Rp891.970.000 pada tahun 2022 dan 2023. Program-program seperti pelatihan pertanian hortikultura, UMKM, dan pengolahan hasil pertanian telah dijalankan, namun tidak semua masyarakat miskin terlibat dalam kegiatan tersebut.

Banyak keluarga pra-sejahtera, khususnya buruh tani, tidak pernah diundang dalam pelatihan atau menerima bantuan. Bahkan beberapa penerima bantuan tidak diminta membuat laporan pertanggungjawaban, yang memperlihatkan lemahnya kontrol sosial dan potensi penyimpangan distribusi.

Menurut beberapa informan, distribusi bantuan sosial dan program Dana Desa tidak selalu adil dan transparan. Kelompok petani pemilik lahan atau warga yang memiliki kedekatan sosial dengan aparat desa lebih mudah mengakses program-program ini. Meskipun kebijakan negara bersifat inklusif secara prinsip, pelaksanaannya di tingkat lokal tetap dipengaruhi oleh relasi kuasa dan stratifikasi sosial yang mengakar. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan lahan berimplikasi pada pengaruh sosial dan akses terhadap program negara, bukan sekadar sebagai aset ekonomi.

Ketimpangan dalam akses pendidikan dan kesehatan memperburuk kesenjangan sosial yang ada, karena kedua faktor tersebut sangat menentukan kualitas hidup dan kemampuan seseorang untuk keluar dari kemiskinan. Oleh karena itu, diperlukan intervensi kebijakan publik yang berpihak pada kelompok rentan, terutama buruh tani. Pemerintah perlu memperkuat akses terhadap pendidikan, memperluas cakupan jaminan kesehatan, dan memastikan bahwa Dana Desa serta bantuan sosial benar-benar menjangkau mereka yang paling membutuhkan.

- **Peran Kebijakan Pemerintah dalam Mengurangi Ketimpangan Sosial Ekonomi di Desa Bulurejo**

Selain faktor kepemilikan lahan, dinamika ketimpangan sosial ekonomi di Desa Bulurejo juga sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah desa, khususnya dalam konteks penggunaan Dana Desa. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Iqbal Ramadan et al., (2024), pemerintah Desa Bulurejo telah mengalokasikan sekitar 27,4% dari total Dana Desa pada tahun 2022 dan 2023 untuk program pemberdayaan masyarakat pra-sejahtera. Program ini mencakup pelatihan pertanian hortikultura, pengolahan hasil pertanian, pengembangan UMKM, serta pelatihan keterampilan rumah tangga melalui kelompok PKK. Secara normatif, kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi dan sosial kelompok rentan, termasuk buruh tani yang tidak memiliki lahan.

Namun, implementasi program tersebut tidak sepenuhnya efektif dalam mengatasi ketimpangan. Beberapa kendala yang ditemukan mencakup rendahnya partisipasi masyarakat dalam perumusan program, kurangnya transparansi dalam proses seleksi penerima manfaat, dan lemahnya sistem pengawasan serta evaluasi. Sebagaimana dinyatakan oleh informan dalam penelitian tersebut, distribusi bantuan cenderung dipengaruhi oleh preferensi subjektif aparatur desa, dan tidak semua keluarga pra-sejahtera diikutsertakan secara aktif dalam pelatihan maupun penerimaan bantuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan kebijakan, tanpa dukungan partisipatif dan sistem akuntabilitas yang memadai, belum tentu menghasilkan perubahan struktural yang signifikan.

Dalam konteks teori stratifikasi sosial Weber, intervensi kebijakan pemerintah desa yang bersifat *top-down* dan tidak merata justru dapat memperkuat posisi dominan kelompok pemilik lahan yang memiliki kedekatan dengan pengambil keputusan, sekaligus memperlemah posisi sosial buruh tani yang tidak hanya kekurangan modal ekonomi, tetapi juga modal sosial dan politik. Dengan demikian, kebijakan publik yang bertujuan memberdayakan buruh tani perlu dilaksanakan dengan prinsip inklusivitas, transparansi, dan relevansi terhadap kebutuhan nyata masyarakat.

Keterlibatan aktif masyarakat sejak tahap perencanaan hingga evaluasi tidak hanya akan meningkatkan legitimasi program, tetapi juga memperkuat daya tawar kelompok buruh tani dalam struktur sosial desa. Untuk itu, kebijakan yang adil dan partisipatif menjadi kunci dalam mendorong mobilitas sosial vertikal dan mengurangi ketimpangan yang bersifat struktural di tingkat pedesaan.

- **Strategi Bertahan Hidup Buruh Tani dalam Menghadapi Ketimpangan**

Ketimpangan sosial ekonomi yang dialami buruh tani di Desa Bulurejo mendorong munculnya berbagai strategi bertahan hidup yang bersifat adaptif dan informal. Tanpa akses terhadap lahan pertanian, pendapatan tetap, atau jaminan sosial memadai, buruh tani menggunakan berbagai cara untuk mempertahankan kelangsungan hidup keluarga mereka. Strategi ini mencerminkan respons sosial dari kelompok yang terpinggirkan secara struktural, sekaligus memperlihatkan bagaimana tindakan sosial dan agensi individu tetap bekerja dalam kondisi terbatas sejalan dengan pendekatan mikro sosiologi yang digunakan dalam penelitian ini.

Salah satu strategi yang paling dominan adalah bekerja *serabutan*. Ketika tidak ada pekerjaan tani, buruh tani berpindah menjadi buruh bangunan, tukang angkut hasil panen, ojek musiman, atau tenaga harian di desa lain. Jenis pekerjaan ini bersifat tidak tetap dan bergantung pada musim serta permintaan lokal. Meskipun tidak memberikan stabilitas ekonomi, kerja *serabutan* menjadi sumber penghasilan utama dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi. Sebagian buruh tani juga mencoba membuka usaha mikro skala rumah tangga. Beberapa menjual gorengan, makanan ringan, membuka warung kelontong, atau menjadi pedagang kecil di sekitar pasar desa.

Data Pemerintah Desa Bulurejo tahun 2020–2024 mencatat adanya empat unit Industri Kecil Menengah (IKM), terutama di bidang produksi batako, yang menyerap sembilan tenaga kerja. Selain itu, sektor informal seperti perdagangan kelontong, produksi makanan ringan, dan jasa kecil-kecilan seperti penjahit atau tambal ban juga mulai berkembang di tengah keterbatasan. Sayangnya, akses terhadap sektor-sektor ini masih sangat terbatas di kalangan buruh tani karena keterbatasan modal, keterampilan, dan hubungan sosial dengan pelaku usaha yang sudah lebih mapan.

Strategi bertahan hidup lainnya adalah mengandalkan jaringan sosial berbasis komunitas. Bantuan dari saudara, gotong royong, pinjaman informal, dan solidaritas tetangga menjadi jaring pengaman ketika pendapatan tidak mencukupi atau ketika terjadi krisis seperti sakit atau gagal panen. Dalam situasi tertentu, buruh tani lebih mengandalkan hubungan emosional dan kedekatan sosial daripada skema bantuan resmi yang tidak selalu dapat mereka akses. Namun, semua bentuk strategi ini bersifat jangka pendek dan belum cukup mampu mengubah posisi mereka dalam struktur sosial ekonomi desa.

Dalam perspektif teori stratifikasi sosial Max Weber, kelompok buruh tani ini tidak hanya kekurangan modal ekonomi, tetapi juga terpinggirkan dalam akses terhadap status dan kekuasaan. Mereka minim dilibatkan dalam kelompok tani, jarang diundang dalam musyawarah desa, dan tidak mendapatkan prioritas dalam program pemberdayaan. Dengan demikian, strategi bertahan hidup yang dijalankan buruh tani di Desa Bulurejo lebih menggambarkan usaha bertahan dalam struktur yang timpang daripada peluang untuk mobilitas sosial yang nyata. Untuk itu, strategi ini seharusnya tidak hanya dipahami sebagai bukti ketangguhan, tetapi juga sebagai indikator penting bagi perumusan kebijakan yang lebih adil dan inklusif.

Pemerintah desa maupun pembuat kebijakan perlu merancang intervensi yang membuka akses nyata terhadap pelatihan, modal usaha, jaminan sosial, dan partisipasi formal dalam proses pengambilan keputusan agar strategi bertahan ini bisa berubah menjadi jalan keluar dari kemiskinan yang struktural.

- **Kesesuaian dengan Penelitian Sebelumnya**

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Wanimbo (2015), yang menunjukkan bahwa ketimpangan sosial di masyarakat pedesaan sering kali dipengaruhi oleh akses terbatas terhadap sumber daya seperti pendidikan, teknologi, dan modal. Penelitian ini memperlihatkan bahwa meskipun buruh tani memiliki keterbatasan dalam hal pendidikan dan teknologi, petani pemilik lahan memiliki keuntungan dalam mengakses sumber daya ini, yang memungkinkan mereka untuk lebih berkembang secara ekonomi.

Hasil penelitian ini juga mendukung temuan Mernawati et al. (2018) yang menunjukkan bahwa kepemilikan lahan memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan sosial ekonomi. Petani yang memiliki lahan lebih luas cenderung memiliki lebih banyak peluang untuk meningkatkan pendapatan mereka, sedangkan buruh tani yang tidak memiliki lahan berada dalam posisi yang lebih rentan terhadap ketidakpastian ekonomi.

Penelitian ini menempati posisi unik dalam literatur sosiologi agraria di Indonesia karena menggabungkan pendekatan mikro dengan teori stratifikasi sosial Weber dalam mengkaji buruh tani tanpa lahan. Berbeda dari studi sebelumnya yang berfokus pada distribusi lahan secara makro atau dampak ekonomi agraria secara agregat, penelitian ini menggali pengalaman subjektif dan struktur ketimpangan secara simultan. Dengan demikian, studi ini tidak hanya melengkapi kekosongan empiris di wilayah Desa Bulurejo, tetapi juga memperluas pendekatan analisis dalam melihat relasi kelas, status, dan kekuasaan di pedesaan.

- **Perbedaan Fokus dengan Penelitian Lain**

Meskipun memiliki benang merah dalam kajian ketimpangan agraria, fokus penelitian ini berbeda dengan studi oleh Angkoso et al. (2020), yang menekankan fragmentasi tanah sebagai faktor utama penyebab ketimpangan sosial di kalangan petani gurem. Penelitian Angkoso menyoroti proses pewarisan, jual beli, dan hibah yang menyebabkan menyempitnya lahan pertanian dan berdampak pada ketimpangan distribusi tanah. Sebaliknya, penelitian ini memusatkan perhatian pada kelompok yang berada di bawah petani gurem, yakni buruh tani yang sama sekali tidak memiliki lahan, dan oleh karena itu mengalami ketimpangan yang lebih kompleks secara ekonomi, simbolik, dan politis.

Penelitian ini juga menyoroti pentingnya strategi bertahan hidup yang dijalankan oleh buruh tani, seperti kerja *serabutan*, pemanfaatan jaringan sosial, dan penghematan ekonomi rumah tangga. Di samping itu, dukungan sosial dari keluarga dan komunitas lokal berperan sebagai bantalan dalam menghadapi kerentanan struktural. Dengan demikian, penelitian ini memperluas wacana ketimpangan agraria dari sekadar persoalan distribusi fisik tanah menjadi persoalan struktur sosial yang lebih luas, termasuk dalam akses terhadap sumber daya sosial dan partisipasi dalam kebijakan desa.

- **Kontribusi Unik Penelitian Ini**

Salah satu kontribusi unik dari penelitian ini adalah penekanan pada strategi bertahan hidup yang digunakan oleh buruh tani untuk mengatasi ketimpangan sosial ekonomi. Penelitian ini menemukan bahwa buruh tani, meskipun menghadapi ketidakpastian ekonomi, mengembangkan berbagai strategi untuk bertahan hidup, seperti bekerja *serabutan* dan membuka usaha kecil. Beberapa buruh tani bahkan mengandalkan jaringan sosial mereka untuk mendapatkan dukungan dalam mengatasi krisis ekonomi.

Penelitian ini juga mengungkapkan dampak jangka panjang dari ketimpangan sosial terhadap generasi berikutnya. Beberapa anak buruh tani di Desa Bulurejo putus sekolah karena keterbatasan ekonomi, yang semakin memperburuk siklus kemiskinan. Temuan ini menunjukkan bahwa ketimpangan sosial tidak hanya berdampak pada individu saat ini, tetapi juga mempengaruhi peluang sosial dan ekonomi anak-anak mereka di masa depan.

Dampak intergenerasional ini memperlihatkan bahwa ketimpangan bukan hanya peristiwa sesaat, melainkan proses yang direproduksi melalui institusi keluarga, pendidikan, dan ekonomi desa. Tanpa intervensi berbasis hak dan distribusi yang adil, anak-anak buruh tani cenderung kembali masuk ke dalam siklus pekerjaan informal berupah rendah. Penelitian ini menegaskan bahwa program peningkatan kesejahteraan desa tidak cukup jika hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur, tetapi harus menyoroti pada distribusi akses jangka panjang: pendidikan gratis, jaminan sosial berkelanjutan, dan peluang ekonomi produktif untuk generasi muda desa.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa ketimpangan sosial ekonomi antara buruh tani yang tidak memiliki lahan dan petani pemilik lahan di Desa Bulurejo, Kecamatan Purwoharjo, Banyuwangi sangat dipengaruhi oleh kepemilikan lahan, akses terhadap pendidikan, kesehatan, peluang ekonomi, serta keberfungsian kebijakan lokal. Penelitian ini mengungkapkan bahwa petani pemilik lahan menikmati keuntungan sosial dan ekonomi yang lebih baik, seperti pendapatan yang stabil, akses yang lebih luas terhadap pendidikan dan kesehatan, serta keterlibatan yang lebih tinggi dalam aktivitas sosial dan pengambilan keputusan di tingkat desa. Sebaliknya, buruh tani yang tidak memiliki lahan terjebak dalam ketidakpastian ekonomi dan keterbatasan akses terhadap sumber daya penting, yang memperlemah posisi mereka dalam struktur sosial masyarakat.

Temuan ini mendukung teori stratifikasi sosial Max Weber yang menekankan bahwa kepemilikan ekonomi merupakan faktor kunci dalam pembentukan status sosial. Akan tetapi, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa intervensi kebijakan pemerintah desa melalui Dana Desa belum sepenuhnya mampu menjembatani ketimpangan ini. Rendahnya partisipasi buruh tani dalam program pemberdayaan, serta lemahnya pengawasan dan distribusi program, justru memperdalam jurang ketimpangan sosial yang ada. Dalam konteks ini, ketimpangan tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga politis dan simbolik.

Untuk mengatasi ketimpangan ini, perlu adanya kebijakan publik yang lebih inklusif dan berbasis

pada kebutuhan lokal. Program yang dapat memperbaiki akses pendidikan dan kesehatan bagi buruh tani, seperti subsidi pendidikan, pelatihan keterampilan, serta jaminan kesehatan yang terjangkau, sangat diperlukan. Selain itu, kebijakan redistribusi lahan atau program sewa lahan dengan biaya rendah juga dapat menjadi solusi untuk mengurangi ketimpangan sosial ekonomi antara buruh tani dan petani pemilik lahan. Dengan strategi tersebut, diharapkan peluang mobilitas sosial buruh tani dapat meningkat dan ketimpangan sosial ekonomi di Desa Bulurejo dapat diminimalisir secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Angkoso, J. B., Luthfi, A. N., & Sudibyanung, S. (2020). Distribusi Penguasaan dan Pemilikan Tanah Pertanian di Desa Ngelegok, Kabupaten Karanganyar. *Tunas Agraria*, 3(2), 101–121. <https://doi.org/10.31292/jta.v3i2.111>
- Hekmatyar, V., & Nugroho, F. (2018). POLA PENGUASAN TANAH DAN DISTRIBUSI KESEJAHTERAAN RUMAH TANGGA DI PEDESAAN JAWA TIMUR. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 4(1). <https://doi.org/10.31292/jb.v4i1.206>
- Helaluddin. (2019). *Mengenal lebih Dekat dengan Pendekatan Fenomenologi: Sebuah Penelitian Kualitatif*. Open Science Framework. <https://doi.org/10.31219/osf.io/stgfb>
- Iqbal Ramadan, Hary Priyanto, & Herwin Kurniadi. (2024). BULUREJO-BANYUWANGI VILLAGE FUND POSTULATE AS SUPPORTING THE EFFECTIVENESS OF EMPOWERING PRE-PROSPEROUS COMMUNITIES. *Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan Dan Humaniora)*, 8(1), 1203–1209. <https://doi.org/10.36526/santhet.v8i1.3973>
- Juariyah, S. (2012). Analisis Kondisi Sosial Ekonomi dan Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Srigading, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, 7(1). <https://doi.org/10.21831/jep.v7i1.577>
- Maunah, B. (2015). *STRATIFIKASI SOSIAL DAN PERJUANGAN KELAS DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI PENDIDIKAN*. 03(01).
- Mernawati, M., Hayati, H., & Muktasam, M. (2023). Dampak Status Penguasaan Lahan Terhadap Pendapatan Petani Jagung Di Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*, 9(2), 156–160. <https://doi.org/10.29303/jseh.v9i2.338>
- Nurul Huda, S. (2022). Perubahan Struktur Sosial Ekonomi Masyarakat Perdesaan. *JCIC : Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial*, 4(2), 31–36. <https://doi.org/10.51486/jbo.v4i2.79>
- Sihaloho, M., Sri Wahyuni, E., & A. Kinseng, R. (2016). PERUBAHAN STRUKTUR AGRARIA, KEMISKINAN, DAN GERAK PENDUDUK: SEBUAH TINJAUAN HISTORIS. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 4(1). <https://doi.org/10.22500/sodality.v4i1.14406>
- Siska Wahyuni Fitri, Aulia Rahman, Nelfia Nofitri, & Januar Januar. (2023). Stratifikasi Sosial dalam Sistem Perekonomian Masyarakat Urban. *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, 2(4), 307–318. <https://doi.org/10.55606/concept.v2i4.819>
- Susilawati, N. (2019). *SOSIOLOGI PEDESAAN*. INA-Rxiv. <https://osf.io/67an9>
- Syah, R. H. (2015). STRATIFIKASI SOSIAL DAN KESADARAN KELAS. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 2(1), 31–48. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v2i1.2239>
- Wanimbo, E. (2019). Kehidupan Sosial Ekonomi Keluarga Petani dalam Meningkatkan Taraf Hidup (Studi di Desa Bapa Distrik Bogonuk Kabupaten Tolikara Propinsi Papua). *Journal of Social and Culture*, 12(3), 1–18.
- Yusrida, Y., & Ritonga, S. (2024). Analisis historis stratifikasi sosial dan pembatasan perkawinan dalam masyarakat batak angkola kota Padang Sidempuan. 9(2), 112–120. <https://doi.org/10.29210/30034735000>